

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja keuangan merupakan tingkat pencapaian suatu target kegiatan keuangan pemerintahan daerah. tingkat pencapaian ini diukur melalui indikator-indikator keuangan yang dapat dinilai dari hasil pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sudah seharusnya Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah mendapatkan perhatian lebih, bukan hanya Pemerintah Pusat saja yang menyorotinya, melainkan juga dilakukan oleh masyarakat setempat karena berkaitan dengan manfaat yang diterima masyarakat untuk mendapatkan hak kesejahteraan.

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan pihak internal maupun pihak eksternal. Dilihat dari sisi manajemen perusahaan pihak internal, laporan keuangan merupakan alat pengendali dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan (Mahsun, 2006:123).

Laporan keuangan pemerintah daerah perlu ditingkatkan kualitasnya agar laporan keuangan tersebut tidak menyesatkan dan merugikan pihak-pihak yang mengandalkan laporan keuangan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan. Laporan keuangan menyajikan informasi tentang apa yang telah terjadi saja karena bersifat historis, sehingga timbul kesenjangan kebutuhan informasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan berperan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga laporan tersebut harus dibuat secara sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca laporan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyusun Laporan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran Tahun 2018 dalam bentuk Laporan Keuangan. Laporan Keuangan terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran,
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
3. Neraca per 31 Desember,
4. Laporan Operasional,
5. Laporan Arus Kas,
6. Laporan Perubahan Ekuitas,
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 100 ayat (4), Laporan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan Keuangan Tahun 2018 ini disusun berdasarkan gabungan dari laporan keuangan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan informasi keuangan yang berada dalam Pengelolaan Kas Daerah. Sejak tahun 2015 Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 7 (tujuh) komponen laporan, yaitu:

1. Laporan Realisasi APBD,
2. Neraca,
3. Laporan Arus Kas,
4. Laporan Perubahan saldo Anggaran Lebih,
5. Laporan Operasional,
6. Laporan Perubahan Ekuitas, dan
7. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Secara ringkas Laporan realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun anggaran 2014 s.d 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

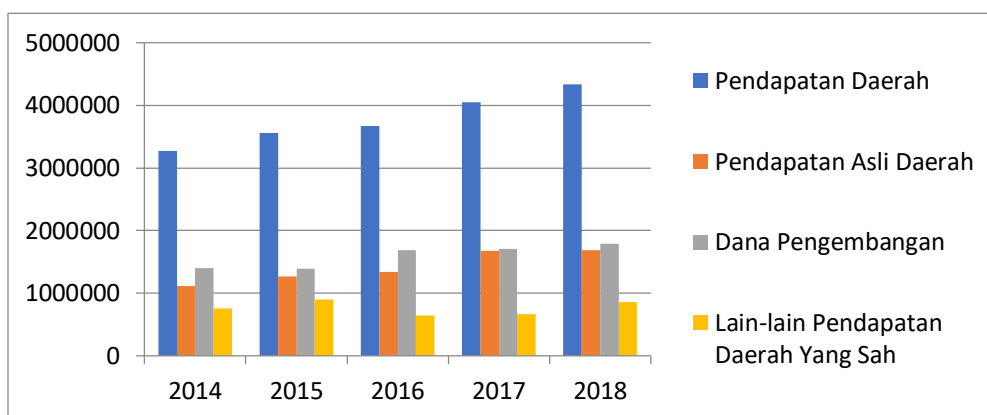
Ringkasan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2014 s.d 2018

Tahun	Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
2014	3.273.379.955.995,16	1.115.332.938.500,16	1.402.935.437.170,00	755.111.580.325,00
2015	3.556.219.038.762,24	1.266.786.627.409,24	1.388.639.002.033,00	900.793.409.320,00
2016	3.668.041.957.746,70	1.335.283.958.792,70	1.690.087.946.119,00	642.670.052.835,00
2017	4.045.685.362.112,53	1.671.806.819.696,53	1.708.887.132.594,00	664.991.409.822,00
2018	4.332.577.984.768,01	1.685.558.666.147,01	1.793.474.341.790,00	853.544.976.831,00

Sumber : Data Keuangan Kabupaten Sidoarjo tahun 2014 s.d 2018

Grafik 1.1

Ringkasan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2014 s.d 201



Dari gambaran Tabel serta Grafik diatas Kabupaten Sidoarjo selama 5 (lima) tahun anggaran, pada sisi pendapatan menunjukkan bahwa Dana Perimbangan masih mendominasi penerimaan daerah dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini mengindikasikan masih tingginya ketergantungan fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo terhadap Pemerintah Pusat selama kurun waktu 2014 s.d 2018.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tema ini dengan mengangkat judul: "Evaluasi Kinerja dan

Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo.

1.2 Topik Yang Dilaporkan Pada Praktik Kerja Lapangan

Agar pembahasan suatu masalah lebih terfokus maka disini diperlukan identifikasi masalah. Adapun Identifikasi Masalah yaitu sebagai berikut :

Bagaimana Kinerja dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo dari Tahun 2014 s.d 2018 ?

1.3 Tujuan Pelaporan Praktik Kerja Lapangan

Adapun maksud dan tujuan dalam penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui Kinerja dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo dari Tahun 2014 s.d 2018.

1.4 Landasan Teori

1.4.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Sijabat (2013), kinerja keuangan merupakan tingkat pencapaian suatu target kegiatan keuangan pemerintahan daerah yang diukur melalui indikator-indikator keuangan yang dapat dinilai dari hasil pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Sumarjo (2010), kinerja keuangan pemerintah daerah adalah luaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan

kuantitas dan kualitas yang terukur. Kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan, yaitu memperbaiki kinerja pemerintah daerah, membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, serta mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2002).

Menurut Halim (2007), pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk digunakan sebagai tolok ukur dalam:

- 1) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- 2) Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- 3) Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
- 4) Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- 5) Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

1.4.2 Akuntansi Pemerintahan

Secara umum akuntansi dibedakan atas akuntansi sektor swasta dan akuntansi sektor publik. Menurut Mardiasmo (2002:2), akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam

rangka memenuhi kebutuhan hak publik, antara lain meliputi Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Universitas, dan organisasi nirlaba lainnya.

Menurut Mardiasmo (2002:7), perbedaan sifat dan karakteristik sektor publik dengan sektor swasta dapat dilihat dengan membandingkan beberapa hal, yaitu :

1. Tujuan Organisasi,
2. Sumber pembiayaan,
3. Pola pertanggungjawaban,
4. Struktur Organisasi,
5. Karakteristik anggaran,
6. *Stakeholder* yang dipengaruhi, dan
7. Sistem akuntansi yang digunakan.

Akuntansi sektor publik dibedakan atas Akuntansi Pemerintah dan Akuntansi Sosial. Nordiawan, Putra dan Rahmawati (2012:4), menjelaskan Akuntansi Pemerintah mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi - transaksi yang terjadi di Badan Pemerintah. Ghozali dan Ratmono (2008:3), menyatakan bahwa dalam akuntansi pemerintah, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah yang menyangkut organisasi pemerintah dan organisasi-organisasi lain yang tidak bertujuan mencari laba (*non-profit organization*).

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah perlu mengatur standar akuntansi pemerintahan daerah agar dapat digunakan secara seragam di seluruh pemerintahan daerah. Akuntansi pemerintah menggunakan beberapa basis akuntansi yaitu dimulai dari basis kas, dilanjutkan dengan basis kas menuju akrual dan basis akrual.

1. Basis Kas menurut PP Nomor 71 tahun 2010 didukung dengan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
2. Basis kas menuju akrual menurut PP Nomor 71 tahun 2010 didukung dengan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan akuitas dana berbasis akrual.
3. Basis akrual menurut lampiran I.02 PSAP 01 dalam paragraf 8 PP Nomor 71 tahun 2010 didukung dengan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 pasal 1 ayat (10) adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1.4.3 Laporan Keuangan

Menurut Darminto (2011), laporan keuangan merupakan objek dari analisis terhadap laporan keuangan. Pemakai laporan keuangan meliputi para investor dan calon investor, kreditor atau pemberi pinjaman, pemasok, kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah dan lembaga lainnya, karyawan dan masyarakat, dan para pemegang saham. Menurut Mahmudi (2010) Laporan

keuangan pemerintah daerah adalah suatu alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit kerja di dalamnya.

Komponen laporan keuangan yang lengkap berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 Revisi Tahun 2009 adalah:

- 1) Neraca atau Laporan posisi keuangan pada akhir periode.
- 2) Laporan laba rugi komprehensif.
- 3) Laporan perubahan ekuitas.
- 4) Laporan arus kas.
- 5) Catatan atas laporan keuangan.
- 6) Laporan posisi keuangan awal periode komparatif sajian akibat penerapan retrospektif, penyajian kembali, atau reklasifikasi pos-pos laporan keuangan.

1.4.3.1 Komponen Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, komponen pokok laporan keuangan Pemerintah Pusat atau Daerah terdiri dari:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Komponen yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran meliputi:

- a) Pendapatan adalah semua penerimaan kas umum negara atau kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat atau daerah, dan tidak perlu dibayar kembali pembayarannya oleh pemerintah. Secara umum pendapatan dapat dipahami sebagai hak pemerintah daerah yang menambah kekayaan bersih akibat transaksi masa lalu.
- b) Belanja adalah semua pengeluaran kas umum negara atau kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dan periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah. Belanja daerah dapat dipahami sebagai kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi kekayaan bersih akibat transaksi masa lalu.
- c) Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Komponen yang dicakup secara langsung oleh neraca meliputi:

- a) Asset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya.
- b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintahan. Karakteristik kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban di dalam konteks pemerintahan, muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain atau lembaga internasional.
- c) Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana terdiri dari: Ekuitas Dana Lancar, yaitu selisih

antara asset lancar dan dana cadangan atas kewajiban jangka pendek; Ekuitas Dana Investasi, yaitu selisih antara asset nonlancar dan dana cadangan atas kewajiban jangka panjang; dan Ekuitas Dana Cadangan, yaitu dana yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

3) Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu.

Komponen yang dicakup secara langsung oleh Laporan Arus Kas meliputi:

- a) Penerimaan adalah semua penerimaan kas umum negara atau kas daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- b) Pengeluaran adalah semua pengeluaran kas umum negara atau kas daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

4) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-Undang APBN atau Perda APBD.
- b) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan.
- c) Mengajukan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- d) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- e) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual yang dimodifikasi atas pendapatan dan belanja serta rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
- f) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

1.4.4 Peranan Pelaporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk

membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatan terhadap perundang-undangan. Suatu entitas pelaporan wajib melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan sebagai berikut:

- 1) Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- 2) Manajemen Membantu mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan.
- 3) Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat.
- 4) Keseimbangan Antargenerasi Membantu mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.4.5 Tujuan Pelaporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan pemanfaatan bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- 2) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.
- 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan serta hasil yang telah dicapai.
- 4) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
- 5) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.4.6 Persamaan dan Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik dan Sektor Komersial

Prinsip akuntansi manajemen sektor publik tidak banyak berbeda dengan prinsip akuntansi manajemen yang diterapkan pada sektor komersial. Akuntansi Manajemen sektor publik dan sektor pemerintah juga mempunyai tujuan yang sama, yaitu menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan tepat waktu. Secara umum, periode siklus akuntansi yang digunakan juga sama yaitu periode 1 Januari–31 Desember. Kedua sektor ini memakai istilah-istilah yang sama, misalnya buku harian, buku besar, laporan keuangan, dan lain sebagainya. Akuntansi manajemen juga digunakan sebagai alat pengendalian baik bagi sektor komersial maupun pemerintah. Siklus akuntansi baik sektor publik maupun sektor komersial juga memiliki kesamaan, namun terdapat jurnal tambahan pada akuntansi publik yaitu jurnal korolari. Jurnal korolari adalah jurnal yang dibuat untuk mengakui rekening-

rekening neraca yang timbul akibat transaksi rekening-rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jurnal tersebut dibuat untuk merubah basis cash menjadi basis accrual sehingga hasil realisasi anggaran dapat merubah posisi keuangan pada neraca.

Berikut merupakan beberapa persamaan antara sektor publik dan sektor komersial (Renyowijoyo, 2010):

- 1) Keduanya merupakan bagian yang integral dari sistem ekonomi negara, dan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi.
- 2) Keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu kelangkaan sumber daya (*scarcity of resources*), sehingga harus menggunakannya secara ekonomis, efisien, dan efektif.
- 3) Pengendalian manajemen yang sama, yaitu perencanaan dan pengendalian pertanggungjawaban.
- 4) Menghasilkan produk yang sama berupa transportasi, pendidikan, kesehatan, dan jenis pelayanan lainnya.
- 5) Keduanya terikat pada ketentuan perundang-undangan dan hukum yang disyaratkan.

Beberapa persamaan antara sektor publik dan sektor komersial terkait laporan keuangan antara lain (Renyowijoyo, 2010):

- 1) Akuntansi sektor publik maupun akuntansi sektor komersial sama-sama memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi.

- 2) Akuntansi sektor publik maupun akuntansi sektor komersial mengikuti prinsip-prinsip dan standar akuntansi yang diterima secara umum.
- 3) Keduanya merupakan bagian terpadu dari sistem ekonomi yang sama dan juga menggunakan sumberdaya yang langka untuk mencapai tujuan.
- 4) Keduanya harus menggunakan dan mengkonversi sumber daya yang langka yang akan diolah untuk menghasilkan barang dan jasa dalam bentuk yang lebih berguna.
- 5) Sama-sama menghasilkan laporan keuangan yang sangat diperlukan untuk mengelola organisasi.
- 6) Laporan keuangan yang dihasilkan merupakan informasi yang sangat berguna bagi proses pengambilan keputusan, khususnya keputusan di bidang ekonomi.
- 7) Sama-sama memerlukan informasi yang akurat dan dapat dipercaya agar kualitas keputusan yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif dan efisien.

Beberapa perbedaan yang dapat dilihat antara akuntansi manajemen sektor komersial dengan pemerintah adalah:

- 1) Akuntansi manajemen sektor komersial lebih fokus pada pengoptimalan penggunaan sumber daya, sedangkan akuntansi manajemen sektor pemerintah lebih fokus kepada pemberian informasi biaya. Hal tersebut menyebabkan perhitungan biaya pada akuntansi manajemen sektor pemerintah kurang mempertimbangkan perhitungan biaya dan manfaat, sehingga seringkali terjadi

ketidakoptimalan penggunaan anggaran dan kurang maksimalnya pelaksanaan prinsip 3E (ekonomis, efisien, dan efektif).

- 2) Terdapat perbedaan dalam pengklasifikasian biaya. Akuntansi manajemen sektor komersial membagi biaya ke dalam biaya langsung dan tidak langsung, serta ke dalam biaya tetap dan variabel. Akuntansi manajemen sektor pemerintah membagi biaya menurut peraturan perundangan, fungsi, dan jenis belanja.
- 3) Terdapat perbedaan standar yang digunakan untuk menetapkan jenis biaya. Penentuan standar biaya yang umum dilakukan pada sektor komersial adalah dengan didasarkan pada *Generally Accepted Accounting Principles* (Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum), sedangkan penentuan pada sektor pemerintah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Akuntansi manajemen sektor publik dan sektor komersial memiliki lingkup yang berbeda, sehingga memiliki perbedaan seperti dalam tabel berikut:

Tabel 1.2
Perbedaan Sektor Publik dan Sektor Komersial

No.	Perbedaan	Sektor Publik/Pemerintahan	Sektor Swasta/Komersial
1.	Tujuan Organisasi	<i>Nonprofit motive</i>	<i>Profit motive</i>
2.	Sumber Pendanaan	Pajak, Retribusi, Uang, Obligasi Pemerintah, Laba BUMN/BUMD, Penjualan aset Negar, dan sebagainya; Sumbangan, Hibah	Pembiayaan internal: Modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva. Pembiayaan Eksternal: Utang Bank, Obligasi, penerbitan saham.
3.	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban kepada publik/masyarakat dan parlemen (DPR/DPRD)	Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor.
4.	Struktur Organisasi	Birokratis, kaku, dan hirarkis	Fleksibel: datar, piramid, lintas fungsional, dan sebagainya.
5.	Karakteristik Anggaran	Terbuka untuk publik	Tertutup untuk publik
6.	Sistem Akuntansi	Basis Kas	Basis Akrual

Sumber : (Mardiasmo, 2002)

1.4.7 Standart Akuntansi Pemerintah (SAP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 3 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Pemerintah, 2014). Menurut KSAP (Komite Standar Akuntansi Pemerintah), Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD. KSAP, (2015) Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintah adalah pedoman wajib dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka tercapainya transparansi dan akuntabilitas.

1.4.8 Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa yang dimaksud SAP Berbasis Akrua adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan financial berbasis akrua, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN atau APBD.

Reformasi proses akuntansi pemerintah dari basis kas ke basis akrua, tidaklah mudah. Yang tidak kalah pentingnya adalah merubah pelaksana (SDM) yang familiar dengan kebijakan lama tidaklah mudah. Namun mengingat akuntansi basis akrua merupakan suatu keharusan, agar informasi yang disajikan dapat disajikan secara transparan dan akuntabel. Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrua diterapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Standar Akuntansi berbasis akrua dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah. Perubahan dari akuntansi berbasis kas menuju akrua menjadi akrua penuh membawa pengaruh terhadap pencatatan dan jenis laporan keuangan yang dihasilkan. Ketika akrua

hendak dilakukan sepenuhnya untuk menggambarkan berlangsungnya transaksi atau kejadian, maka kelebihan yang diperoleh dari penerapan akrual adalah tergambarnya informasi operasi atau kegiatan. Dalam Akuntansi Pemerintah gambaran perkembangan operasi atau kegiatan dibuat dalam bentuk Laporan Operasional atau Laporan Surplus atau Defisit.

Dengan ditetapkannya PP No. 71 tahun 2010 maka penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual telah memiliki landasan hukum. Terbitnya Permendagri 64 Tahun 2013 semakin memperjelas model akuntansi berbasis akrual yang diterapkan mulai tahun 2015. Yang berarti bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk segera menerapkan SAP berbasis akrual. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, PP No. 24 Tahun 2005 dan PP No. 71 Tahun 2010 tidak banyak berbeda, keberadaan pos piutang, Aset Tetap, Hutang merupakan bukti adanya proses pembukuan yang dipengaruhi oleh asas akrual. Perbedaan PP No. 71 Tahun 2010 dengan PP No. 24 Tahun 2005, terkait dengan komponen laporan keuangan.

1.5 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Dengan terlaksanakannya kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak yang terkait, yakni:

1. Bagi mahasiswa pelaksana Praktik Kerja Lapangan (PKL) :
 - a. Dapat memenuhi tugas mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai syarat wajib kelulusan mahasiswa Diploma III Universitas Trunojoyo Madura.
 - b. Sebagai penerapan disiplin ilmu akuntansi yang diperoleh selama kuliah dalam menghadapi permasalahan perusahaan.
 - c. Mengetahui secara langsung apa saja kendala dan permasalahan akuntansi yang terjadi serta mencari tahu bagaimana solusi penyelesaian yang harus dilaksanakan.
 - d. Memperoleh pengalaman kerja dan mengetahui bagaimana kinerja penyusunan Laporan Keuangan di Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.

1.6 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Dengan terlaksanakannya kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak yang terkait, yakni:

1. Bagi mahasiswa pelaksana Praktik Kerja Lapangan (PKL) :
 - a. Dapat memenuhi tugas mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai syarat wajib kelulusan mahasiswa Diploma III Universitas Trunojoyo Madura.
 - b. Sebagai penerapan disiplin ilmu akuntansi yang diperoleh selama kuliah dalam menghadapi permasalahan perusahaan.
 - c. Mengetahui secara langsung apa saja kendala dan permasalahan akuntansi yang terjadi serta mencari tahu bagaimana solusi penyelesaian yang harus dilaksanakan.

- d. Memperoleh pengalaman kerja dan mengetahui bagaimana penerapan laporan keuangan di Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- 2. Bagi Jurusan D-III Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura
 - a. Sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana program atau kurikulum yang telah diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna lulusannya.
 - b. Sebagai pengenalan Pendidikan program Diploma III Akuntansi pada perusahaan atau instansi yang membutuhkan tenaga kerja yang dihasilkan oleh program Diploma III Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura.
 - 3. Bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 - a. Sebagai sarana media untuk meningkatkan kerjasama antar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Perguruan Tinggi khususnya Program Diploma III Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura.
 - b. Memberikan peran dan kontribusi positif kepada masyarakat dan mahsiswanya, khususnya mahasiswa karena telah membantu dalam penyusunan tugas akhir.
 - 4. Bagi Pembaca :
 - a. Sebagai bahan bacaan yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang akuntansi dalam dunia kerja yang sesungguhnya.
 - b. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan yang diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan sejenis di masa yang akan datang.

1.7 Rencana Kegiatan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang beralamatkan di jalan Pahlawan 56, Sidoarejo. Praktik Kerja Lapangan ini dimulai pada tanggal 6 Januari – 28 Februari 2020.

Tema yang akan diambil mengenai dengan prosedur pengeluaran kas, yaitu dengan Topik “Evaluasi Kinerja dan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo.”

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Metode Analisis Data

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, karena menurut penulis metode ini yang paling sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan penulisan tugas akhir oleh penulis. Metode analisis deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, akurat dan faktual mengenai fakta. Sifat serta fenomena yang diteliti (Nawawi, 1998). Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah, Lexy J Meleong (2013).

Dengan adanya metode analisis data penulis dapat melakukan observasi terhadap realisasi di lapangan dengan kesesuaian peraturan yang

berlaku. Analisis dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara teori atau peraturan-peraturan yang berlaku dengan data-data yang diperoleh. Penulis melakukan pemahaman kondisi instansi, kemudian melakukan analisis perbedaan yang terjadi, dan menentukan perbedaan yang berhubungan dengan hal-hal yang mendasar, sehingga dari analisis tersebut dapat diambil kesimpulan tentang evaluasi kinerja dan kemampuan keuangan daerah pada BPKAD Kabupaten Sidoarjo, serta dapat memberikan saran yang tepat mengenai penerapannya di masa yang akan datang.

1.8.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data merupakan bagian yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam penyusunan tugas akhir ini, karena sumber data merupakan sumber dimana informasi yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung untuk dijadikan sebagai data yang akan dibahas oleh penulis dalam isis pembahasan penyusunan tugas akhir ini, untuk mendapatkannya penulis memerlukan teknik pengumpulan data yang menjadi langkah strategis untuk penyusunan tugas akhir ini.

1.8.2.1 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer, Waluyo (2010) berpendapat data primer merupakan fakta yang diperoleh langsung melalui penelitian. Sumber data utama di catat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman audio dan pengambilan foto. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat,

mendengar, dan bertanya. Data yang diperoleh oleh penulis dilakukan dengan cara wawancara kepada pegawai BPKAD Kab. Sidoarjo.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh penulis secara tidak langsung dari BPKAD Kab. Sidoarjo berupa buku data Keuangan Tahun 2014 s.d 2018.

1.8.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara strategis yang dilakukan untuk mengungkap informasi dan fenomena sesuai dengan cangkupan yang terjadi di lapangan. Maka teknik pengumpulan data dilakukan sesuai dengan cangkupan secara kualitatif yaitu melakukan beberapa teknik diantaranya teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, baik secara langsung maupun jarak jauh, untuk membahas dan menggali informasi tertentu guna mencapai tujuan tertentu pula. Proses wawancara ini terjadi dengan adanya komunikasi bolak balik antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, untuk menggali topik tertentu yang dibahas.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara detail tentang Evaluasi Kinerja dan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo.

2. Metode Observasi

Observasi atau pengamatan adalah proses untuk memperoleh data dari tangan pertama dengan melakukan mengamati orang dan tempat pada saat melakukan penelitian. Observasi dilakukan berupa Praktek Kerja Lapangan (PKL) selama 30 Hari di BPKAD Kab. Sidoarjo dengan survey secara langsung terhadap data laporan keuangannya.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan cara mempelajari catatan- catatan atau dokumen-dokumen yang tersimpan, baik berupa undang-undang, catatan transkip, buku, dan lain sebagainya. Menurut Sugiyono (2013:240), dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Motode ini dilakukan sebagai pelengkap sekaligus untuk mengetahui bagaimana Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.